



Keentingan Amerika Serikat dan Prancis dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya pada Tahun 2011

Adhika Isthianto Utomo

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

United States and France were the two countries that had high involvement in humanitarian intervention in Libya in 2011. In fact, the humanitarian intervention process was deviated from the original goal of humanitarian intervention which was for humanitarian reasons. This indicates that the United States and France have their own interests behind humanitarian intervention in Libya. This research aims to analyze the interests of the United States and France in carrying out humanitarian intervention in Libya in 2011. In this study also briefly explained how the conflict in Libya occur until the UN Security Council gave a decision to intervene. This study uses qualitative and explanatory research methods with two data sources, primary and secondary data. The theoretical framework used in this research is Neorealism theory. From the research that has been done, there are three interests of the United States and France in carrying out humanitarian intervention in Libya. The First is the interests of the United States and France to control oil in Libya, and the second is the political factor of the United States and France, and the third is the interest of the United States to overthrow the Muammar Gaddafi regime.

Keyword: *Humanitarian Intervention, United States, France, Libya, National Interest*

Pendahuluan

Libya adalah merupakan salah satu negara yang mengalami konflik internal di dalam negaranya. Konflik yang terjadi di dalam Libya adalah konflik antara kubu Muammar Gaddafi dan kelompok kontra dari kepemimpinan Gaddafi. Konflik ini adalah konflik yang memiliki tujuan untuk mendesak Muammar Gaddafi agar mundur dari kursi kepemimpinan Libya. Pada awalnya, kelompok penuntut Gaddafi melakukan demonstrasi di Benghazi pada tanggal 15 februari 2011 dengan tuntutan agar Muammar Gaddafi untuk segera turun (Jazeera, 2011). Proses demonstrasi yang terjadi akhirnya berkembang menjadi sebuah perang saudara. Akibat dari demonstrasi tersebut, terjadi pertempuran antara pihak pemerintah dibawah kepemimpinan Muammar Gaddafi dan kelompok oposisi yang menuntut turunnya Muammar Gaddafi dari kursi kepemimpinan Libya.

Konflik yang terjadi di Libya ini membuat masyarakat internasional merasa simpati. Jumlah korban serta banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tentara Gaddafi sendiri membuat komunitas internasional ingin menghentikan konflik yang terjadi dan menghentikan jatuhnya korban secara terus menerus. Banyak cara untuk mencegah atau mengurangi konflik atau peperangan yang sedang terjadi didalam suatu negara. Intervensi kemanusiaan yang di Libya sendiri adalah sebuah keputusan yang diambil setelah dewan keamanan terlebih dahulu mengeluarkan keputusan terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam negara Libya. Keputusan dewan keamanan PBB terkait kejadian Libya adalah resolusi dewan keamanan PBB 1970 dan 1973.

Amerika Serikat dan Prancis adalah dua negara yang sangat terlibat di dalam intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011. Prancis sendiri adalah merupakan negara yang memiliki ide untuk melakukan larangan terbang pada wilayah udara Libya. Larangan terbang sendiri adalah salah poin yang terdapat pada resolusi 1970 yang dikeluarkan PBB sebagai bentuk dari usaha-usaha untuk menekan rezim Muammar Gaddafi. Sementara itu, Amerika Serikat, meskipun tidak seintens Prancis dalam penyusunan rencana untuk intervensi kemanusiaan tersebut, Amerika Serikat merupakan negara yang sangat jelas memiliki keterlibatan secara militer di Libya. Meskipun dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Libya pada 2011 Amerika Serikat terkesan hanya berperan sebagai pendukung, namun Amerika Serikat masih sangat memiliki posisi yang cukup penting dalam intervensi tersebut secara militer. Hal tersebut dapat dilihat dari terdapat beberapa jabatan penting di dalam NATO yang dipegang oleh komandan yang berasal dari Amerika Serikat (Madelene Lindström 2012).

Amerika Serikat dalam intervensi kemanusiaan di Libya ini memiliki peran yang cukup penting karena Amerika Serikat sendiri adalah negara pertama yang melakukan misi di Libya terkait dengan konflik yang terjadi. Pada awalnya, operasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi warga sipil nonkombatan. USAFRICOM yang pada saat itu mendapat perintah dari pemerintah Amerika Serikat membentuk JTF-OD (*Joint Task Force Odyssey Dawn*) yang berfungsi untuk memberikan bantuan kemanusiaan. JTF-OD ini dikomandani oleh Laksamana Samuel J. Locklear III dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah dikeluarkannya resolusi 1970 dari Dewan Keamanan PBB, ancaman penggunaan kekerasan terhadap warga sipil meningkat. Pada saat itu, Amerika Serikat mulai membentuk koalisi yang terdiri dari 15 negara yang tergabung di dalam NATO dan Liga Arab. Pada awal bulan Maret 2011, keadaan di Libya semakin memburuk, dan saat itu Amerika Serikat beserta Koalisinya menganggap bahwa perlu ada penggunaan militer di Libya. Pada tanggal 17 Maret, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1973 sebagai tindakan lebih lanjut dari resolusi 1970. Pada tanggal 18 Maret, Presiden Barack Obama mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat beserta koalisinya harus mengimplementasikan resolusi 1973. Lalu, pada tanggal 19 Maret dilaksanakan Operasi *Odyssey Dawn* (JTF-OF) hingga tanggal 31 Maret. Setelah tanggal 31 Maret, Amerika Serikat mulai melakukan transisi kepemimpinan misi di Libya tersebut kepada NATO dan negara-negara Liga Arab (Joe Quartararo 2012).

Prancis adalah salah satu negara yang merupakan pendukung terbesar dari keputusan untuk dilakukannya intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011. Dalam keterlibatan Prancis dalam intervensi ini, Presiden Prancis, Nicolas

Sarkozy, memiliki tujuan untuk mengumpulkan koalisi internasional untuk berperang di Libya, dan Prancis sendiri adalah negara yang paling mengejar legitimasi untuk melakukan tindakan di Libya (Stratfor 2011). Prancis merupakan negara yang penting dalam intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011 dikarenakan Prancis membentuk *Libya Contact Group* yang bertujuan untuk mengkoordinasikan usaha-usaha internasional yang membahas mengenai dukungan paska konflik (Madelene Lindström 2012).

Keputusan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya dianggap menjadi kepentingan negara saja terlihat dari terdapat beberapa kasus yang dilakukan kelompok militer dari negara Amerika Serikat dan sekutunya melalui NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Salah satu kasus yang melibatkan kelompok militer tersebut adalah pada saat penyerangan yang dilakukan di Libya, pasukan dari negara tersebut menghancurkan pipa saluran air yang ada di Libya yang tentu saja fasilitas tersebut adalah fasilitas sipil dan saluran pipa air tersebut adalah merupakan salah satu fasilitas vital dikarenakan mengalirkan air ke 70% penduduk Libya. selain itu, serangan-serangan yang dilakukan di Libya dengan dalih untuk menyelamatkan para warga tidak terlalu terlihat dalam intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya. jumlah korban yang jatuh pada saat konflik terjadi sebelum dilakukannya intervensi berjumlah kurang lebih 1000 nyawa. Namun, jumlah korban menjadi berkali-kali lipat pasca konflik Libya dan terjadinya intervensi kemanusiaan. Jumlah korban pasca konflik dan intervensi kemanusiaan yang terjadi adalah berjumlah kurang lebih menjadi 10.000 nyawa. Dari perdebatan-perdebatan yang terjadi terkait dengan keputusan intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011, keputusan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya adalah merupakan kesempatan bagi Amerika Serikat dan Prancis untuk memenuhi kepentingan negaranya masing-masing (Zenko 2016).

Pembahasan

Faktor pertama adalah kepentingan untuk menguasai minyak Libya. Libya sendiri adalah salah satu negara di Benua Afrika yang menghasilkan sumber daya alam khususnya minyak. Libya menjadi salah satu negara penghasil minyak dan banyak negara-negara di dunia yang ingin membeli minyak kepada Libya dikarenakan minyak yang dihasilkan oleh Libya adalah minyak dengan kualitas yang baik. Minyak yang dihasilkan oleh Libya adalah minyak yang mengandung sulfur yang sangat sedikit atau yang memiliki istilah sebagai "*Sweet Crude Oil*". Sebutan tersebut adalah sebutan dalam dunia perminyakan untuk minyak-minyak yang memiliki kadar sulfur yang rendah. Jenis minyak tersebut sangatlah menjadi incaran para negara-negara yang telah memiliki tingkat perindustrian yang sudah maju. Selain itu, jenis minyak ini juga lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan jenis minyak lainnya (*Gas and Oil Connection*. 2002)

Salah satu hal yang menyebabkan mengapa minyak dan sumber daya alam lainnya menjadi salah satu agenda utama dalam keputusan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya adalah pada saat kepemimpinan Muammar Gaddafi, ia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang menjalankan usahanya di dalam wilayah Libya. Perusahaan yang terkena proses nasionalisasi oleh Presiden Muammar Gaddafi meliputi bank-bank internasional dan perusahaan-perusahaan minyak yang terdapat di wilayah Libya. Pemerintahan

Muammar Gaddafi mulai melakukan proses nasionalisasi pada dekade 1970an. Alasan mengapa pemerintahan Muammar Gaddafi melakukan nasionalisasi perusahaan minyak adalah meningkatnya permintaan minyak dunia dikarenakan pada saat itu sedang terjadi krisis minyak dunia, lalu alasan berikutnya adalah mendapatkan bagian pendapatan yang lebih besar. Dengan permintaan minyak dunia yang meningkat, tentu saja harga minyak itu sendiri akan semakin meningkat. Apabila Muammar Gaddafi melakukan nasionalisasi perusahaan minyak di Libya, tentu saja akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi Libya. Selain itu dengan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang terdapat di Libya, Muammar Gaddafi semakin dapat mengontrol aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan minyak internasional yang berada di Libya telah berada selama puluhan tahun di Libya dan memiliki kontrak untuk mengakses minyak mentah yang terdapat di Libya. Dengan dicabutnya sanksi yang dikeluarkan oleh Washington pada tahun 1994, membuat para industri-industri minyak berlomba-lomba untuk membuka investasinya lebih lanjut. Namun keinginan perusahaan-perusahaan minyak tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Setelah dicabutnya sanksi dari Washington tersebut, pemerintah Libya di bawah kekuasaan Muammar Gaddafi mengatur ulang kesepakatan-kesepakatan mengenai minyak Libya dengan perusahaan-perusahaan minyak internasional. Aturan tersebut membuat jatah perusahaan-perusahaan minyak internasional untuk mengakses minyak yang ada di Libya menurun dari yang awalnya memiliki akses sebanyak 50% turun menjadi 12% saja. Menurut Muammar Gaddafi, pengaturan ulang kontrak-kontrak mengenai minyak ini bertujuan untuk lebih memberikan akses minyak Libya kepada masyarakat Libya sendiri dan mengurangi kontrol perusahaan-perusahaan minyak internasional untuk mengakses minyak yang ada di Libya. Dengan lebih banyaknya minyak yang dikendalikan oleh masyarakat Libya sendiri, Muammar Gaddafi berpendapat tentu saja hal tersebut akan meningkatkan perekonomian Libya dari sektor perminyakan (Indrawan 2013).

Salah satu hal yang membuat perusahaan minyak yang ada di Libya (perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa) memiliki kekhawatiran mengenai keberlangsungan pengolahan minyak mereka di Libya adalah pada tanggal 13 Maret 2011, Muammar Gaddafi melakukan pertemuan dengan petinggi-petinggi dari 3 negara yaitu Russia, China, dan India di kota Tripoli. Pertemuan Muammar Gaddafi dengan ketiga negara ini adalah bertujuan untuk menawarkan kerja sama pada sektor perminyakan dan berencana untuk menggantikan perusahaan-perusahaan minyak asal Amerika Serikat dan Eropa yang telah berada di Libya sebelumnya. Dengan semakin dipersulitnya perusahaan-perusahaan minyak yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa, maka sangatlah nyata bahwa kepentingan negara-negara tersebut dalam bidang perminyakan sangat bergantung terhadap keberhasilan untuk menggulingkan Muammar Gaddafi. Apabila dalam intervensi kemanusiaan tersebut berhasil menggulingkan rezim Muammar Gaddafi, tentu saja perusahaan-perusahaan minyak asal Amerika Serikat dan Eropa tersebut akan mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan akses dan melanjutkan pengolahan minyak yang terdapat di Libya (Buro 2011).

Baik Amerika Serikat dan Prancis, memiliki kepentingan minyak yang besar di negara Libya. Amerika Serikat sendiri merupakan negara dengan jumlah perusahaan minyak terbanyak di Libya yang berjumlah 24 perusahaan (Directorate of Intelligence 2011). Dengan adanya kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak luar negeri oleh Muammar Gaddafi, tentu saja akan sangat berpengaruh kepada Amerika Serikat untuk mengontrol perusahaan-perusahaan minyaknya yang berada di negara Libya. Ditambah lagi dengan jumlah persentase pembagian keuntungan yang menurun cukup drastis, tentu saja keuntungan yang akan diperoleh Amerika Serikat sendiri dari sektor perminyakan yang berasal dari wilayah Afrika akan berkurang.

Selain Amerika Serikat, Prancis dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011, memiliki kepentingan terkait dengan sektor energi. Meskipun jumlah perusahaan minyak yang dimiliki Prancis tidak sebanyak Amerika Serikat, Prancis juga menjadikan minyak sebagai tujuan utama. Prancis sendiri memiliki sebanyak 8 perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah Libya (Directorate of Intelligence 2011). dengan jumlah perusahaan yang tidak sebanyak Amerika Serikat, Prancis memiliki keinginan untuk mendapatkan bagian minyak yang lebih besar. Hal ini terdapat pada surat elektronik yang dikirimkan Presiden Sarkozy kepada Hillary Clinton yang berisi kepentingan-kepentingan Prancis dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya pada saat itu, dan salah satu poin yang diinginkan oleh Prancis adalah untuk mendapatkan bagian keuntungan dari sektor perminyakan yang ada di Libya (Hoff 2011)

Kepentingan yang kedua adalah kepentingan politik baik dari Amerika Serikat maupun Prancis. Amerika Serikat, adalah merupakan negara yang memiliki kekuatan dan hegemoni di dalam dunia internasional. Selain itu, Amerika Serikat juga sangat memiliki kontrol terhadap negara-negara lainnya, bahkan hingga memiliki kontrol kepada sistem internasional. Benua Afrika sendiri sebelumnya di mata Amerika Serikat sendiri adalah merupakan sebuah Benua yang kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat sendiri. hal tersebut berubah ketika terjadi peristiwa 9/11. Akibat peristiwa tersebut, Amerika Serikat memiliki salah satu kepentingan negara yaitu adalah melawan tindak terorisme. Benua Afrika sendiri dianggap oleh Amerika Serikat sebagai tempat yang cocok untuk memperluas ideologi mereka mengenai perang melawan terorisme. Selain itu, Afrika sendiri bagi kepentingan politik Amerika Serikat mulai berkembang. Hal tersebut bukan hanya berasal dari alasan letak geografisnya saja, melainkan Amerika Serikat berpikir bahwa negaranya dan negara-negara di Afrika berhubungan secara sejarah, nilai-nilai budaya, perdagangan, dan kepentingan dari masing-masing pihak. Selain itu, Amerika Serikat juga mengincar kerja sama yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai dari yang dianut oleh Amerika Serikat sendiri yaitu adalah kebebasan, kedamaian, kestabilan, serta peningkatan taraf kesejahteraan (Desai 2016).

Berkaitan dengan ideologi Amerika Serikat mengenai perlawanan terhadap tindakan terorisme, kepentingan politik Amerika Serikat pada saat melakukan intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011 adalah Amerika Serikat menganggap Libya dapat mengganggu keamanan nasional Amerika Serikat dan mengganggu *status quo* yang ada khususnya dalam bidang terorisme. Muammar Gaddafi sendiri memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara-negara Barat dan cenderung bersikap agresif. Dari sikap Muammar Gaddafi

terhadap negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat, maka Amerika Serikat sendiri menyebutkan bahwa Libya adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam kategori *Rogue State*. Konsep *Rogue State* sendiri menurut Amerika Serikat adalah negara membahayakan bagi Amerika Serikat dan mengancam keamanan nasional negara tersebut. Libya sendiri masuk ke dalam kategori *Rogue State* bagi Amerika Serikat pertama kali disebutkan oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton pada tahun 1994 (O'Reilly, 2012).

Lalu hal yang membuat Amerika Serikat melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya pada tahun 2011 dan sekaligus mengimplementasikan ideologinya untuk melawan tindak terorisme adalah bahwa Amerika Serikat menganggap bahwa apabila Muammar Gaddafi memenangkan perang sipil yang terjadi di Libya, maka negara Libya tersebut akan kembali menjadi negara sponsor terhadap tindak terorisme (Kazianis 2011). Dasar dari hal ini adalah karena rezim dari Muammar Gaddafi selama beberapa dekade memiliki sejarah bahwa Libya di bawah kepemimpinannya telah menjadi negara sponsor dari tindak terorisme. Dukungan yang diberikan Libya kepada aksi terorisme berupa dukungan moral, maupun dukungan tindakan yang berhubungan dengan tindak terorisme itu sendiri. Sebagian besar tindakan terorisme yang dilakukan oleh Libya adalah merupakan hasil dari intervensi dari aktivis-aktivis yang berasal dari Tripoli terhadap politik-politik negara Arab. Bentuk-bentuk dukungan Libya terhadap tindak terorisme antara lain adalah dengan menjadi penyuplai senjata kepada kelompok-kelompok terorisme. Selain itu, Libya juga menyediakan dokumen-dokumen perjalanan yang umumnya digunakan kelompok-kelompok teroris dalam melaksanakan kegiatannya, serta Libya juga mengizinkan penggunaan wilayah negaranya untuk keperluan pelatihan kelompok-kelompok teroris (Boucek 2005)

Hal selanjutnya yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat melalui intervensi kemanusiaan di Libya selain karena alasan sumber daya alam dari Libya itu sendiri adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari persepsi Presiden Barrack Obama mengenai kepentingan nasional dari Amerika Serikat itu sendiri. Persepsi Presiden Barrack Obama mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional yang tidak bertabrakan dengan hukum-hukum internasional maupun nilai-nilai yang dianut oleh komunitas internasional. Salah satu tujuan Amerika Serikat adalah untuk melampaui dampak negatif yang telah membuat stigma bagi Amerika Serikat yang dihasilkan pada saat invasi militer Amerika Serikat ke Irak. Amerika Serikat sendiri mengalami ketidakstabilan politik internasional, khususnya di wilayah Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat mendapatkan pandangan politik publik yang negatif sebagai negara yang agresif dan tentu saja sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang dilakukan Amerika Serikat di dunia internasional, khususnya yang berkaitan dengan intervensi-intervensi terhadap suatu negara. Namun, meskipun demikian, Amerika Serikat tidak begitu saja melepaskan keputusan untuk mengintervensi tersebut begitu saja. Amerika Serikat sendiri menganggap wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara adalah salah satu wilayah yang terpenting. Hal ini disebutkan dalam dokumen strategi pertahanan Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa wilayah Timur Tengah dan wilayah Utara Afrika merupakan wilayah yang sangat

penting bagi kebijakan Amerika Serikat itu sendiri dan untuk kedepannya, Amerika Serikat akan memberikan prioritas perlindungan militer kepada negara-negara sekutunya (Shadi Hamid 2013).

Negara selanjutnya yang memiliki kepentingan dalam keputusan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya adalah negara Prancis. Tujuan politik Prancis yang pertama adalah untuk mencegah Gaddafi untuk melanjutkan rencana jangka panjangnya untuk menggunakan nilai tukar Dinar Emas yang berlaku di Afrika. Cadangan emas yang dimiliki Muammar Gaddafi membuat Gaddafi ingin membuat mata uang atau nilai tukar yang baru yang berlaku di Afrika. Dalam Benua Afrika sendiri, Prancis telah memiliki pengaruh terkait dengan mata uang di beberapa negara di Afrika. Prancis menggunakan mata uang CFA Franc sebagai mata uang di negara-negara bekas jajahan Prancis. Hal ini bertujuan agar Prancis dapat mengintegrasikan perekonomian negara-negara tersebut dibawah administrasi Prancis serta mengontrol baik sumber daya alam maupun sistem dan struktur ekonomi dari negara-negara tersebut. CFA Franc Prancis telah digunakan di 12 negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah sebagai nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut. Apabila Muammar Gaddafi mewujudkan gagasannya dengan membuat mata uang Dinar Emas berlaku di Afrika, maka tentu saja mata uang CFA Franc akan ditinggalkan dan akan menggunakan mata uang Dinar Emas milik Muammar Gaddafi tersebut. Oleh karena itu, Prancis menggunakan momen intervensi kemanusiaan tersebut untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi untuk mempertegas pengaruh mereka yang ada sebelumnya (Hoff 2016).

Selain berpengaruh langsung terhadap regional Afrika, keterlibatan Prancis bertujuan untuk menambah kredibilitas dan popularitas Prancis di dalam keanggotaan Uni Eropa (Simon 2013). Keinginan Prancis untuk memperkuat posisinya di dalam Uni Eropa merupakan hal yang penting bagi Prancis setelah terjadinya krisis yang terjadi di dalam Uni Eropa yang dimulai sejak tahun 2009. Setelah terjadinya krisis tersebut, Jerman menggunakan kekuatannya untuk membentuk ulang institusi tersebut sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Jerman. Hal ini juga membuat Prancis memiliki kesan hanya sebagai pendukung Jerman terhadap keputusan-keputusan yang diambil, khususnya kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan krisis yang terjadi pada Uni Eropa pada saat itu. Salah satu tujuan Prancis melakukan intervensi kemanusiaan di Libya adalah untuk menegaskan kembali posisi mereka di Eropa, khususnya kepada negara Jerman bahwa mereka masih memiliki kapabilitas secara militer dan mampu untuk memimpin Eropa. Hal yang dilakukan Prancis terkait hal ini adalah dengan membentuk koordinasi dengan Inggris terkait dengan keputusan mengintervensi Libya pada tanggal 2 November 2010 sebagai respon dari kekuatan politik dan ekonomi yang luar biasa yang dimiliki oleh Jerman (Stratfor 2011).

Faktor ketiga adalah penggulingan rezim Muammar Gaddafi sendiri. Atas banyaknya kejahatan yang terjadi di Libya pada era kepemimpinan Muammar Gaddafi, keputusan untuk melakukan intervensi kemanusiaan dilaksanakan. Menurut PBB cara untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Libya adalah dengan menghentikan Muammar Gaddafi sebagai pemimpin di Libya. Kepentingan untuk menggulingkan Gaddafi sendiri terlihat dari bagaimana serangan-serangan yang dilakukan kepada Libya banyak menimbulkan korban (baik dari kelompok kombatan, maupun dari warga sipil). Selain banyaknya

kejahatan yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi, alasan untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi adalah karena Libya dibawah kepemimpinan Gaddafi memiliki keterkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi di negara lain, antara lain Mali, Syria, dan beberapa negara lainnya. Libya dibawah rezim Muammar Gaddafi sendiri memiliki keterkaitan atas terjadinya konflik tersebut dengan cara menyuplai senjata kepada negara-negara tersebut sehingga konflik di negara-negara tersebut terus berlangsung (Nichols 2013)

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Libya dinilai oleh masyarakat internasional sebagai bentuk kejahatan dari rezim Muammar Gaddafi terhadap kelompok yang berlawanan dengan kelompok Muammar Gaddafi. Salah satu respon atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Gaddafi adalah dilakukannya intervensi kemanusiaan yang dilaksanakan pada tahun 2011. Keputusan untuk melakukan intervensi kemanusiaan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB setelah mengeluarkan resolusi yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh rezim Muammar Gaddafi. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah resolusi 1970 dan 1973. Resolusi tersebut berisi tentang larangan terbang di wilayah udara Libya, pembekuan asset-aset yang dimiliki Muammar Gaddafi serta hal-hal lainnya yang dinilai dapat mengurangi kejahatan dari rezim Gaddafi. Dalam melakukan intervensi kemanusiaan, baik Amerika Serikat maupun Prancis memiliki kepentingan tersendiri sesuai dengan kepentingan negara masing-masing.

Terdapat tiga kepentingan Amerika Serikat maupun Prancis saat melakukan intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011. Kepentingan yang pertama adalah untuk menguasai minyak di Libya. Libya adalah salah satu negara di Benua Afrika yang menghasilkan minyak terbaik. Faktor yang mendorong untuk menguasai minyak yang ada di Libya adalah nasionalisasi minyak yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi pada era 1970-an. Hal tersebut membuat keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan minyak milik negara-negara barat yang sudah beroperasi di Libya mengalami penurunan. Oleh karena itu, dengan dilakukannya intervensi kemanusiaan di Libya, negara-negara tersebut memiliki tujuan untuk kembali menguasai minyak di Libya.

Kepentingan yang kedua adalah faktor politik. Amerika Serikat dan Prancis memiliki faktor politik terkait dengan kepentingan negaranya masing-masing. Amerika Serikat, menganggap bahwa Libya dapat mengganggu keamanan nasional Amerika Serikat karena Libya sendiri menurut Amerika Serikat adalah negara yang memiliki keterkaitan dengan tindak terorisme. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk meraih kembali kepercayaan dari negara-negara Arab setelah mendapatkan citra yang buruk akibat dari invasi Afghanistan dan Iraq. Amerika Serikat sendiri memutuskan melakukan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan rezim Muammar Gaddafi yang telah melakukan banyak kejahatan sehingga kembali mendapatkan pandangan yang baik dari negara-negara di wilayah tersebut. Sementara bagi Prancis, kepentingan politik dari negara tersebut adalah untuk mempertahankan pengaruhnya yang telah ada di negara Afrika. Dengan ide mata uang Dinar Emas buatan Gaddafi, Prancis memiliki ketakutan bahwa mata uangnya yang telah dipakai di negara-negara Afrika akan tergantikan. Maka dari itu salah satu kepentingan Prancis dari

intervensi yang dilakukan tersebut adalah untuk menjaga agar negara-negara di wilayah tersebut tetap menggunakan mata uang Prancis. Selain itu Prancis juga bertujuan untuk menegaskan kembali posisinya di dalam Uni Eropa sendiri.

Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi. Pada saat Muammar Gaddafi menjabat sebagai presiden Libya, banyak sekali bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Gaddafi. Oleh karena itu cara yang dilakukan untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Muammar Gaddafi tersebut adalah dengan cara menggulingkan Muammar Gaddafi dari kursi Presiden. Tujuan penggulingan rezim Muammar Gaddafi juga dikarenakan rezim tersebut melakukan suplai senjata kepada negara-negara yang sedang berkonflik sehingga secara langsung menyebabkan konflik yang ada terus terjadi

Referensi

Anon., 2002. *Gas and Oil Connection*. [Online]

Diakses Dari:

<http://www.gasandoil.com/news/africa/5e0c2037b81bb66c75e95e0c9728f13e>
[Diakses 27 august 2018].

Anon., 2011. *Benghazi is the maker of Libyan history*. [Online]

Diakses Dari: <http://www.aljazeera.net/news/pages/ee1995da-6146-422c-91b5-c546d62999c2>

Boucek, C., 2005. Libyan State-Sponsored Terrorism: An Historical Perspective. *The Jamestown Foundation*, 3(6).

Brown, E., 2016. *Why Qaddafi had to go: African gold, oil and the challenge to monetary imperialism*. [Online]

Diakses Dari: <https://theecologist.org/2016/mar/14/why-qaddafi-had-go-african-gold-oil-and-challenge-monetary-imperialism>

[Diakses 28 august 2018].

Buro, A., 2011. NATO intervention in Libya is in its own (oil) interest.

Internationale Versöhnungsbund, p. 3.

Desai, M., 2016. US Power Dynamics in Africa. *Lund University*, pp. 21-22.

Dr. Abu Bakar Bin Mohd Yusuf, N. R. S. B. M. D. N. M. H., 2002.

Implementation of Gold Dinar: Is it the End of Speculative Measure. *Journal of Economic Cooperation*, p. 74.

Hoff, B., 2016. *Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Intervention*.

[Online]

Diakses Dari: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/>

[Diakses 31 august 2018].

Indrawan, J., 2013. Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Kajian Wilayah LIPI*, Volume 4.

Intelligence, D. o., 2011. The Libyan Oil Industry: Dependence on Foreign Company. *Directorate of Intelligence*.

Joe Quartararo, M. R. R. W., 2012. Libya's Operation Odyssey Dawn Command and Control.

Madelene Lindström, K. Z., 2012. Setting the Stage for the Military Intervention in Libya. *FOI*.

Newman, A., 2011. *Gadhafi's Gold-money Plan Would Have Devastated Dollar*. [Online]
Diakses Dari: <https://www.thenewamerican.com/economy/markets/item/4630-gadhafi-s-gold-money-plan-would-have-devastated-dollar>
[Diakses 29 august 2018].

Nichols, M., 2013. *Libya arms fueling conflicts in Syria, Mali and beyond: U.N. experts*. [Online]
Diakses Dari: <https://www.reuters.com/article/us-libya-arms-un/libya-arms-fueling-conflicts-in-syria-mali-and-beyond-u-n-experts-idUSBRE93814Y20130409>

O'Reilly, K. P., 2012. A Rogue Doctrine?: The Role of Strategic Culture on US Foreign Policy Behavior. *Foreign Policy Analysis*.

Shadi Hamid, P. M., 2013. Bringing the United States Back Into the Middle East. *The Washington Quarterly*.

Stratfor, 2011. Special Series: European Libya's Intervention. *Stratfor Global Intelligence*, p. 7.